KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:3694-4252-5260-3096

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099245/2025

Revisi ke 01
Tanggal : 22 Februari 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(005)	MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi	:	(03)	Ditjen Badan Peradilan Umum
3. Provinsi	:	(13)	KALIMANTAN BARAT
4. Kode/Nama Satker	:	(099245)	PENGADILAN NEGERI SANGGAU
Sebesar	:	Rp. 239.816.000	(DUA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04	PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

			Jumlah Uang
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	239.816.000
005.03.BF.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	239.816.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	239.816.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SANGGAU (167) Rp. 239.816.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099245/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:3694-4252-5260-3096

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode/Nama Satker : (099245) PENGADILAN NEGERI SANGGAU

Program		:	005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				239.816.000
Kegiatan		:	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum				239.816.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:						
Klasifikasi Rincian Output	1	:	1049.AEA	Koordinasi		2,00	kegiatan	1.500.000
Rincian Output		:	01 AEA.001	Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum		2.00	kegiatan	1.500.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan		375,00	Perkara, Berkas Perkara	161.835.000
Rincian Output		:	01 BCA.U08	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah		375.00	Perkara	161.835.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		51,00	Orang	44.000.000
Rincian Output		:	01 QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	(PN)	51.00	Orang	44.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	1049.QCA	Perkara Hukum Perseorangan		11,00	Perkara, Berkas Perkara	32.481.000
Rincian Output		:	01 QCA.001	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	(PN)	1.00	Perkara	360.000
			02 QCA.002	Sidang di luar Gedung Pengadilan	(PN)	10.00	Perkara	32.121.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.

H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099245/2025

DS:3694-4252-5260-3096

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga	: (005)	MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi	: (03)	Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi	: (13)	KALIMANTAN BARAT
Kode/Nama Satker	: (099245)	PENGADILAN NEGERI SANGGAU

1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	239.816.000
1. Rupiah Murni	Rp.	239.816.000
2. PNBP	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0
6. SBSN PBS	Rp.	0

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Ket :			Pagu		Ekuivalen Rupiah
a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
	(2) RPLN	US$	0	Rp.	0
b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
	(2) RHLN	US$	0	Rp.	0
c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0		
d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0		
e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0		
f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099245/2025

DS:3694-4252-5260-3096

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode/Nama Satker : (099245) PENGADILAN NEGERI SANGGAU
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
099245	**PENGADILAN NEGERI SANGGAU**	**-**	**239.816**	**-**	**-**	**-**	**239.816**		
005.03.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**	**-**	**239.816**	**-**	**-**	**-**	**239.816**		
1049	**Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**	**-**	**239.816**	**-**	**-**	**-**	**239.816**		
1049.AEA	Koordinasi	-	1.500	-	-	-	1.500	13 . 02	
	(13.02 KALIMANTAN BARAT / KAB. SANGGAU)								
01	RM	-	1.500	-	-	-	1.500	167@	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	-	161.835	-	-	-	161.835	13 . 02	
	(13.02 KALIMANTAN BARAT / KAB. SANGGAU)								
01	RM	-	161.835	-	-	-	161.835	167@	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	-	44.000	-	-	-	44.000	13 . 02	
	(13.02 KALIMANTAN BARAT / KAB. SANGGAU)								
01	RM	-	44.000	-	-	-	44.000	167	
1049.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	-	32.481	-	-	-	32.481	13 . 02	
	(13.02 KALIMANTAN BARAT / KAB. SANGGAU)								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099245/2025

DS:3694-4252-5260-3096

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode/Nama Satker : (099245) PENGADILAN NEGERI SANGGAU
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	32.481	-	-	-	32.481	167@	
	JUMLAH	**-**	**239.816**	**-**	**-**	**-**	**239.816**		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099245/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:3694-4252-5260-3096

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode/Nama Satker : (099245) PENGADILAN NEGERI SANGGAU

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**099245**	**PENGADILAN NEGERI SANGGAU**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	9.120	23.240	17.900	14.691	11.605	29.197	33.632	15.371	15.251	27.096	19.750	22.960	239.816
		BELANJA BARANG	9.120	23.240	17.900	14.691	11.605	29.197	33.632	15.371	15.251	27.096	19.750	22.960	239.816
	005.03.BF.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	9.120	23.240	17.900	14.691	11.605	29.197	33.632	15.371	15.251	27.096	19.750	22.960	239.816
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	9.120	23.240	17.900	14.691	11.605	29.197	33.632	15.371	15.251	27.096	19.750	22.960	239.816
		PERKIRAAN PENERIMAAN	2.516	2.516	2.646	2.516	2.516	2.516	2.516	2.516	2.746	2.516	2.516	2.532	30.568
		- PNBP (425231)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
		- PNBP (425232)	0	0	130	0	0	0	0	0	230	0	0	0	360
		- PNBP (425233)	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	447	5.320
		- PNBP (425239)	2.073	2.073	2.073	2.073	2.073	2.073	2.073	2.073	2.073	2.073	2.073	2.075	24.878

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099245/2025
IV A. B L O K I R

DS:3694-4252-5260-3096

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT
Kode dan Nama Satker : [099245] PENGADILAN NEGERI SANGGAU

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN			KODE	URAIAN
099245	**PENGADILAN NEGERI SANGGAU**				
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	108.364		
	52 Belanja Barang	Rp.	108.364		
005.03.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**				
1049	**Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**				
1049.AEA	**Koordinasi**				
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)				
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	750		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024				
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				
1049.BCA	**Perkara Hukum Perseorangan**				
	521211 Belanja Bahan(RM)				
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	57.075		
	Efisiensi Anggaran				
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)				
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	11.449		
	Efisiensi Anggaran				
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)				
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	15.000		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				
1049.QCA	**Perkara Hukum Perseorangan**				
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)				
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	24.090		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099245/2025
IV B. C A T A T A N

DS:3694-4252-5260-3096

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT
Kode dan Nama Satker : [099245] PENGADILAN NEGERI SANGGAU

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002